

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (1986). *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Ansori Ahmad, Z. (1986). *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cetakan IV, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 174
- Utomo, H. I. (2020). *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Harsono, B. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Perangin, E. (1994). *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjitrosudibio, R. S. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijke Wetboek*. Jakarta: Balai Pustaka.
- HS, S. (2019). *Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Depok: Rajawali Pers.
- Prajitno, A. A. (2013). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa PPAT*. Malang: Selaras.
- Somardi. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Mutaqien, R. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nuansa Media.
- HR, R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kalsen, H. (2011). *Teori umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Rajawali Grafindo Persada.
- nad, A. K. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Ridwan HR, 2017, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 102

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Praenada Media Group.

Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 96.

Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.

Barhamudin, 2019, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan dan Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang,

Andi Erwin Hamzah, *Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama*, 2023, Volume 7 Nomor 2, hal. 49

Taufiqurrahman, M. (2019). *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*. Jurnal Retentum, 1(1), 55.

Dwi Laksa Marabintang, *Balik Nama Pada Sertifikat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum*, 2022, Volume 5 Nomor 2, Hal. 452

Halilah, S., dan Arif, M. F. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 61.

Tamrin Muchsin, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum*, Madani Legal Review Malrev, Volume 4 Nomor 1, Hal. 66

Dhea Tri Febrina dan Ahars Sulaiman, (2019). *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT*. Jurnal PETITA 1(1), 128.



Ode Pota, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*, 2020, Volume 4 Nomor 2, hal. 174

Komang Febrinayanti Dantes dan I Gusti Apsari Hadi, 2021, *Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Jabatan PPAT*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 9 Nomor 10, Program Studi Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 908

Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 21:00 WITA,
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

